

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniati, B. Madiung dan M. Zulkifli, Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi Di Desa Bontomanai Kecamatan Manngarabombang Kabupaten Takalar, *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, Volume III, Nomor 2, 2021, hlm. 144-151.
- W. S. Nansi, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia, *Jurnal Pemberdayaan Hukum*, Volume II, Nomor 1, 2012, hlm. 1-55.
- Hartana, P. Darmika, D. G. S. Mangku dan N. P. R. Yuliantini, Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Sebagai Jalur Alternatif, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume X, Nomor 3, 2022, hlm. 327-336.
- M. F. Nurahmin, Maisa dan M. R. Syafaat, “Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik Bersertifikat melalui Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu,” *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume IV, Nomor. 6, 2021, hlm. 330-336.
- Ashadi, M. Hafidz dan S. Rahman, Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, *Journal of Lex Generalis*, Volume. II, Nomor. 9, 2021, hlm. 2590-2601.
- H. Panggabean, Tinjauan Hukum Atas Mediasi Dalam Sengketa Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, *Jurnal Rectum*, Volume I, Nomor 2, 2019, hlm. 188-196.
- S. S. Prawira, A. M. Fahmal dan A. Yunus, Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi: Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng, *Journal of Lex Generalis*, Volume I, Nomor 1, 2020, hlm. 1-41.
- Hartana dan M. Cristina, Persengketaan-Persengketaan Tanah di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume VII, Nomor 3, 2019, hlm. 72-79.
- F. L. Sandika, T. Y. Chandra dan E. Kencanawati, “Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Pertanahan Melalui Mediasi,” *Blantika: Multidisciplinary Jurnal*, Volume II, Nomor 2, 2023, hlm. 119-129.

- A. Sinta, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Mediasi (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang), *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik*, Volume XII, Nomor 1, 2021, hlm. 66-78.
- L. O. Angga dan B. Latupono, Mediasi Pertanahan sebagai Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Antara Masyarakat Adat Desa Eti dengan Pemerintah di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, *Kosmik Hukum*, Volume XX, Nomor 2, 2020, hlm. 114-120.
- O. M. Rayiatmaja, A. Silviana dan Triyono, Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Petani dengan PT.Mackenzie Melalui Mediasi (Studi Penyelesaian Sengketa Tanah PT.Mackenzie di Kabupaten Pematang), *Diponegoro Law Journal*, Volume V, Nomor 3, 2016, hlm. 1-20.
- S. W. Sari, Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Volume V, Nomor 1, 2017, hlm. 1-16.
- Y. C. Arwana dan R. Arifin, Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, *Jambura Law Review*, Volume I, Nomor 2, 2019, hlm. 212-236.
- D. Tan, Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume VIII, Nomor 8, 2021, hlm. 2463-2478.

Buku-buku:

- Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 2.
- Mudakir Iskandar Syah, Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah, Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2019, hlm. 160.
- Risnarto, Dampak Sertifikasi Tanah Terhadap Pasar Tanah dan Kepemilikan Tanah Skala Kecil, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 3.
- Rahmat Ramadhani, Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya, Medan: Umsu Press, 2022, hlm. 47.

- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 163.
- Reynlod Simandjuntak, Hukum Perdata, Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022, hlm. 22.
- Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 22.
- Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 77.
- Bambang Sugeng, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi, Jakarta: Kencana, 2012, Cet. ke-1, hlm. 2.
- Charles Webel, Handbook Studi Perdamaian dan Konflik, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017, hlm. 83.
- P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 13-17.
- I.D. Purnamasari, Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan, Bandung: Penerbit Kaifa, 2010, hlm. 2-12.
- Irawati, Martini, *Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019, hlm. 63-64.
- Abd. Rahman, Baso Madiung, *Politik Hukum Pertanahan*, Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017, hlm.28.

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) pasal 4, pasal 7 dan pasal 18 UU Arbitrase.
- Pasal 17 PP No.40/1996 tentang Hak Guna Usaha.
- Pasal 30, 31, 34 UUPA tentang Hak Guna Usaha.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016